

MODALITAS DAN STRATEGI KANDIDAT PADA PILKADA MITRA 2018

Oleh :
Resky Brando Wanta¹

ABSTRAK

Keikutsertaan petahana sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) memang menjadi fenomena yang menarik perhatian. Meskipun di beberapa daerah, petahana tidak selalu bisa mengulang kesuksesannya untuk memenangkan pilkada. Namun setidaknya ada beberapa hal yang menjadi alasan bahwa keberadaannya sebagai kontestan pilkada penting untuk diperhitungkan. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini akan mendeskripsikan pemanfaatan berbagai modalitas yang dimiliki sebagai strategi yang dilakukan oleh pasangan James Sumendap. SH, dan Drs. Jesaja Jocke Legi, pada Pilkada Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018. Modalitas menurut Pierre Bourdieu (1986) yang dimiliki seseorang terdiri modal ekonomi, social, budaya, dan modalitas politik. Temuan penelitian menggambarkan berbagai modalitas tersebut dimanfaatkan oleh pasangan James Sumendap. SH, dan Drs. Jesaja Jocke Legi, untuk merebut dukungan dari masyarakat pemilih dan juga dukungan dari partai politik. Bahkan keunggulan kepemilikan berbagai modalitas tersebut, membuat pasangan ini tidak memiliki lawan, sehingga hanya melawan kotak kosong, pada saat pilkada tahun 2018.

Kata Kunci: Modalitas, Strategi, Pilkada

ABSTRACT

The incumbent's participation as contestants in the Regional Head General Election (Pilkada) has indeed become a phenomenon that has attracted attention. Although in some areas, incumbents are not always able to repeat their success in winning the elections. But at least there are several reasons why his existence as a contestant for the elections is important to be reckoned with. By using a qualitative method, this article will describe the use of various modalities as a strategy undertaken by the James Sumendap couple. SH, and Drs. Jesaja Jocke Legi, in the 2018 Southeast Minahasa Regional Election. The modalities according to Pierre Bourdieu (1986) that a person has consist of economic, social, cultural, and political modalities. The research findings illustrate that the various modalities are utilized by the James Sumendap partner. SH, and Drs. Jesaja Jocke Legi, to win support from the voting community and also support from political parties. Even the advantages of ownership of these various modalities make this pair have no opponents, so they only fight empty boxes, during the 2018 regional elections.

Keywords: Modality, Strategy, Pilkada

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah adalah media masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya untuk memilih calon-calon kepala daerah terbaik sesuai harapan masyarakat. Setiap calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pasti memiliki tujuan untuk memenangkan pemilihan yang diikuti. Untuk memenangkan kompetisi atau persaingan tersebut, semua kandidat tentunya memiliki strategi yang digunakan untuk menang. Strategi kampanye menjadi penting dalam pemenangan sebuah pemilihan, baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT

Menurut Clausewitz (Arifin, 2003:161), strategi merupakan pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan menurut Beaufre (Nimmo, 2005:123), strategi politik merupakan seni yang menggunakan semua kekuatan untuk mencapai semua tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik.

Keikutsertaan petahana sebagai kontestan dalam pilkada memang menjadi fenomena yang menarik perhatian. Meskipun di beberapa daerah, petahana tidak selalu bisa mengulang kesuksesannya untuk memenangkan pilkada. Namun setidaknya ada beberapa hal yang menjadi alasan bahwa keberadaannya sebagai kontestan pilkada penting untuk diperhitungkan.

Pertama, sebagai pemegang kendali lembaga eksekutif petahana memiliki wewenang penuh menggunakan program-program pembangunan untuk membangun citra diri. Secara tidak langsung mereka memiliki rentang waktu dan kesempatan lebih luas berkampanye. Cukup dengan mengklaim bahwa keberhasilan pembangunan adalah buah kerja kerasnya sebagai kepala daerah, maka simpati lebih mudah diraih.

Kedua, dari sisi popularitas tentu saja sosok petahana lebih dikenal dari pada calon lain. Jika calon yang akan mengajukan diri dalam Pilkada perlu biaya dan energi lebih besar untuk sekedar memperkenalkan diri kepada masyarakat, maka petahana tidak perlu melakukannya. Sebab dengan jabatannya dia sudah otomatis mendapatkan popularitas di kalangan masyarakat.

Ketiga, sebagai kepala daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara, James Sumendap nyaris tidak pernah mengalami benturan maupun konflik yang berarti dengan kelompok masyarakat maupun dengan aparat hukum. Sikapnya yang ramah dan santun serta tidak memandang status seseorang dalam pergaulan menjadi magnet yang kuat untuk meraih simpati.

Ketiga hal itulah yang menjadi alasan penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang fenomena pesta demokrasi yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara seiring terpilihnya kembali petahana dan pasangan barunya dalam pesta demokrasi di aras local. Yang menarik di Kabupaten Minahasa Tenggara pada pelaksanaan pilkada pada tahun 2018 silam adalah pasangan James Sumendap dan Jocke Legi hanya melawan kotak kosong. Inilah yang membuat penulis merasa tertarik meneliti tentang perhelatan demokrasi di kabupaten minahasa tenggara.

Di dalam sebuah penerapan strategi, tentunya terdapat kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) atau yang dikenal dengan analisis SWOT. Di dalam konteks penelitian ini, analisis SWOT akan dikaitkan dengan penerapan strategi kampanye pasangan James Sumendap dan Jocke Legi.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Modalitas

A. Pierre Bourdieu (1986), dalam bukunya *The Forms of Capital*, membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Menurut Bourdieu (1986), definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa.

Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang baik materiil maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu. Modal harus ada dalam sebuah ranah, agar ranah tersebut dapat memiliki arti. Namun, hal itu juga dapat dijelaskan pada tingkat yang lain dengan menggunakan rumusan generatif. Penjelasan seperti ini sedikit bersifat artifisial namun bermanfaat.

Keterkaitan antara ranah, habitus, modal bersifat langsung. Nilai yang diberikan modal dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan kultural habitus. Ranah dikitari oleh relasi kekuasaan objektif yang memiliki basis material. Jenis-jenis modal yang dikenali dalam ranah-ranah tertentu dan yang digabungkan ke dalam habitus, sebagian juga dihasilkan oleh basis material tersebut.

Modal juga dipandang Bourdieu sebagai basis dominasi. Beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya. Yang artinya modal bersifat dapat ditukar. Penukaran paling hebat yang telah dibuat adalah penukaran pada modal simbolik, sebab dalam bentuk

inilah modal yang berbeda dipersepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang legitimate. Agar dipandang sebagai seseorang atau kelas yang berstatus dan mempunyai prestise, berarti ia harus diterima sebagai sesuatu yang legitimate. Posisi semacam itu membawa kekuasaan untuk memberi nama (aktivitas, kelompok) kekuasaan mewakili pendapat umum dan utamanya, kekuasaan menciptakan „versi dunia sosial yang resmi“.

Dalam abad ke-16 dan 17 istilah “capital” digunakan untuk menunjuk kepada, atau (a) stok uang yang akan dipakai untuk membeli komoditi fisik yang kemudian dijual guna memperoleh keuntungan, atau (b) stok komoditi itu sendiri. Pada waktu itu istilah “stock” dan istilah “capital” sering dipakai secara sinonim. Perusahaan dagang Inggris yang didirikan dalam masa itu atas dasar saham misalnya, dikenal sebagai “join stock companies” atau „capital stock companies”. Adam Smith dalam *the wealth of nation* (1776) dikutip Augusto Bunga (2008), Pembedaan ini didasarkan atas kriteria sejauh mana suatu unsur modal itu dalam jangka waktu tertentu hanya terkonsumsi sebagian hanya sebagian (kecil) nilainya menjadi susut, maka unsur itu disebut “fixed capital” (misal mesin, bangunan, dan sebagainya). Tetapi jika unsur modal terkonsumsi secara total, maka ia disebut “circulating capital” (misal tenaga kerja, bahan mentah dan sarana produksi).

Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal politik ini jauh lebih sedikit dibanding publikasi mengenai modal simbolik (symbolic capital), modal sosial (social capital), modal budaya (cultural capital) maupun modal ekonomi (economic capital). Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu (1930-2002), adalah sosok pelopor dalam mengkaji berbagai bentuk modal itu (multiple forms of capital). Namun Bourdieu sering dikritik karena cenderung deterministik dan kurang berpijak pada hal-hal empirik dalam membangun teorinya. Kecenderungan kurang berpijaknya Bourdieu pada kenyataan empirik yang kemungkinan membuatnya tidak sempat menajamkan uraiannya mengenai modal politik padahal dinamika akumulasi dan penggunaan modal politik memiliki lingkaran pengaruh sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.

B. Klasifikasi Modalitas Alwi (1992: 36) membagi modalitas atas empat bagian, yaitu modalitas intensional, modalitas epistemik, modalitas deontik, dan modalitas dinamik. Berikut ini dibahas modalitas-modalitas tersebut secara berurutan. 1. Modalitas Intensional Modalitas intensional mencakup ‘keinginan’, ‘harapan’, ‘ajakan’, ‘pembiaran’ dan ‘permintaan’. Faktor keterlibatan pembicara dalam keberlangsungan atau aktualisasi peristiwa merupakan tolak ukur yang membedakan ‘keinginan’ dari ‘harapan’. Sementara itu, ‘ajakan’ dan ‘pembiaran’ dibedakan dari ‘permintaan’ berdasarkan siapa di antara pembicara dan teman pembicara yang akan menjadi pelaku aktualisasi peristiwa (Alwi, 1992, 52-52). Menurut Alwi (1992: 54) ‘keinginan’ terbagi atas dua gradasi yakni keinginan yang kuat dan keinginan yang lemah. Keinginan yang kuat berkadar ‘keinginan’, sementara keinginan yang lemah berkadar ‘kemauan’, ‘maksud’ dan ‘keakanan’. Pengungkap modalitas menyatakan ‘maksud’ karena pemfokusan terletak pada kalimat. Akan tetapi, pengungkap modalitas menyatakan kadar ‘kemauan’ karena pemfokusan terletak pada pengungkap modalitas. Pengungkap modalitas mengandung kadar ‘keakanan’ karena menyiratkan adanya unsur ramalan (Alwi, 1992: 58-59).

B. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani “strategia”, yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata strategia bersumber dari kata strategos yang berkembang dari kata stratos (tentara) dan kata agein (memimpin). Istilah strategi dipakai dalam konteks militer sejak zaman kejayaan Yunani-Romawi sampai awal industrialisasi (Schonder dalam Arifin, 2011: 235). Kemudian istilah strategi itu meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang komunikasi, politik dan komunikasi politik. Hal tersebut penting dalam upaya memenangkan kompetisi dalam pemilihan umum, dan dalam pengambilan keputusan politik lainnya.

Strategi menurut Salusu (1996: 101), merupakan suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungannya dalam kondisi saling menguntungkan. Sedangkan menurut Mintzberg menjelaskan bahwa strategi adalah sebuah rencana atau semacam arah rangkaian tindakan tertentu di dalam suatu organisasi. Strategi dibagi menjadi dua yaitu strategi sebagai rencana dan strategi sebagai taktik. Strategi sebagai rencana adalah sebuah program atau

langkah rencana untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita-cita yang ditentukan, sama halnya dengan konsep strategi perencanaan. Sedangkan pengertian strategi sebagai taktik merupakan sebuah manover spesifik untuk mengelabui atau mengecoh kompetitor (Winardi, 2003: 12).

Menurut Siagian (1985: 21), strategi merupakan cara-cara yang diambil yang sifatnya mendasar dan fundamental yang akan dipergunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan berbagai sarannya dengan selalu memerhitungkan kendala lingkungannya yang pasti akan dihadapi. Lebih lanjut Siagian (1985: 21), mengungkapkan bahwa strategi sebagai rencana yang amat cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sasaran khususnya dalam hal ini adalah ingin mengetahui strategi pemenangan yang digunakan oleh tim pemenangan pasangan calon James Sumendap dan Jocke Legi.

C. Tipe-Tipe Strategi

Tipe strategi menurut Koteen (Jordan, 2014: 10), antara lain yaitu:

1. Corporate Strategy (Strategi Organisasi)
Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, nilai, tujuan, nilai-nilai, inisiatif-inisiatif strategi yang pembahasannya ini diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa;
2. Program Strategy (Strategi Program)
Strategi ini memberikan perhatian implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu, apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi;
3. Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya)
Strategi ini memusatkan perhatian kepada maksimalisasi pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, dan teknologi;
4. Institutional Strategy (Strategi Institusi)
Fokus dari strategi institusional adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis.

Pada dasarnya, strategi pemenangan mencakup beberapa tipe strategi, diantaranya strategi organisasi yang dalam hal ini adalah organisasi tim pemenangan, yang di dalamnya mencakup perumusan misi, nilai, tujuan, nilai-nilai, inisiatif-inisiatif strategi, serta strategi program karena strategi ini memberikan perhatian implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Firmanzah (Pelitawati, 2014: 17-18), terdapat beberapa faktor bagi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dalam sebuah pemilihan baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan di jajaran eksekutif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan pemilih diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Profil Calon
Faktor profil menjadi salah satu faktor penting bagi seorang pemilih untuk menjatuhkan pilihan politiknya dalam suatu pemilihan. Di dalam hal ini, pemilih akan melakukan penilaian mengenai latar belakang calon, reputasi, citra, ideologi dan kualitas para kandidat.
- b. Jaringan
Faktor jaringan menjadi faktor lain bagi seorang pemilih untuk menjatuhkan pilihan politiknya dalam suatu pemilihan. Di dalam hal ini, jaringan yang dibangun oleh seorang calon dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi pemilih yang sudah mengetahui kandidat yang mencalonkan diri. Jaringan tersebut dapat berupa kesamaan organisasi dan lain-lain.
- c. Media
Faktor media merupakan faktor yang dapat mempengaruhi opini publik. Media yang memuat data, informasi dan berita mengenai calon, mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi opini di masyarakat. Demikian pula pemaparan para ahli, iklan politik, hasil seminar, survei dan 18 berbagai hal yang diulas dalam media akan menjadi pertimbangan

pemilih dalam menentukan pilihannya dalam sebuah pemilihan kepala daerah atau pemilihan lain.

d. Tokoh

Faktor tokoh menjadi salah satu faktor penting bagi seorang pemilih untuk menjatuhkan pilihan politiknya dalam suatu pemilihan. Di dalam hal ini, tokoh-tokoh yang dimaksud adalah tokoh pendukung calon yang sudah memiliki popularitas dan nama besar. Tokoh-tokoh tersebut seperti ketua umum partai, kader partai, atau tokoh lain yang mendukung seorang kandidat.

e. Program

Program merupakan salah satu faktor penentu pemilih sebelum menjatuhkan pilihannya. Pemilih dapat memilih seorang kandidat dengan mempertimbangkan program-program yang ditawarkan oleh seorang calon. Program-program tersebut biasanya termuat dalam sebuah visi dan misi yang di dalamnya terdapat program-program pembangunan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

f. Keluarga

Faktor keluarga menjadi salah satu faktor penting bagi seorang pemilih untuk menjatuhkan pilihan politiknya dalam suatu pemilihan. Di dalam hal ini, keluarga biasanya menjadi aktor penting dalam mempengaruhi seseorang sebelum menjatuhkan pilihan politiknya.

g. Uang

Faktor uang bisa disebut juga sebagai faktor transaksi berupa uang. Transaksi yang dilakukan misalnya dengan memberikan uang kepada pemilih agar memilih kandidat yang mencalonkan diri pada saat pemilihan berlangsung.

E. Pemilihan Kepala Daerah

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu, pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi daerah. Karena pemimpin yang pilih secara langsung oleh masyarakat akan lebih paham akan kondisi yang ada di daerah tersebut. Sejak pasca reformasi peraturan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung memang selalu diperbaiki atau diamandemen.

a. Definisi Pemilihan Kepala Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 20 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud dengan pemilihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut dengan pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

Menurut Asshiddiqie (Wirdasari, 2015:25), menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab, sebagai apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakalah pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak.

Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. Lalu menurut Suharizal (Wirdasari, 2015:25-26), mengemukakan pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional. Mengingat esensi pilkada adalah pemilu, dimana secara prosedural dan substansi

adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka pilkada sebagaimana pemilu lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus sebagai derajat akuntabilitas dan kualitas demokrasinya terpenuhi dengan baik. Prihatmoko (2005: 34) juga mengatakan bahwa pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Pilkada langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang kegiatan yang terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (accountabel).

Berdasarkan definisi pemilihan kepala daerah oleh beberapa ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan proses pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin yang akan melaksanakan urusan daerahnya sehingga hak dan kebebasan yang dimiliki oleh rakyat ini harus dimanfaatkan dengan baik agar dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dalam memimpin daerah tersebut.

b. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah

Selain memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam memilih kepala daerahnya secara langsung, pemilihan kepala daerah juga memperkuat otonomi daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, menurut Abdullah (2005: 53) pemilihan kepala daerah memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu :

1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat;
2. Legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD;
3. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD;
4. Mencegah politik uang,

Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di republik ini. Selain itu juga, untuk mempercepat terjadinya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell (dalam Noor, 2011: 34), menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alam. Penelitian kualitatif merupakan studi riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pasangan James Sumendap. SH, dan Drs. Jesaja Jocke Legi, pada Pilkada Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh di olah dengan tahapan: menyeleksi data, klarifikasi data, dan menyusun data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi dan Modal Sosial Pasangan James Sumendap dan Joke Legi

Piere Bourdieu menganggap, modal erat kaitannya dengan persoalan kekuasaan karena disengaja oleh Bourdieu dikonstruksi berdasarkan praktik dominasi. Jelasnya, dominasi dimaksud bergantung atas situasi, sumber daya (kapital) dan strategi pelaku. Korelasi yang dibangun dengan tegas pada kontes Pemilu Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018, semua calon kepala daerah mengerahkan sumber daya dan strateginya masing-masing, berbeda

dengan konstalasi di Kabupaten Minahasa Tenggara dimana petahana James Sumendap akan berhadapan dengan Kotak Kosong. Petahana memiliki dari berbagai jenis kategori modal yang dikuasai baik itu modal sosial, kultural dan lain sebagainya. Kemudian strategi yang diatur oleh petahana juga sangat sistematis, dan melibatkan banyak golongan, pun dengan strategi yang dibangun sejak dalam masa pemerintahan. Keterkaitan konsep kekuasaan yang mendukung teori modal adalah habitus dan ranah. habitus yang dimaksudkan sebagai struktur dalam dunia sosial yang menempatkan manusia sebagai subjek untuk melahirkan persepsi, pemahaman, dan apresiasi.

Sedangkan ranah bisa saja merupakan relasi dan interaksi, kemudian juga bisa saja serupa dengan halnya arena dalam kontes tertentu. Disebut demikian karena arena dalam strukturnya menopang dan mengarahkan strategi yang digunakan oleh orang-orang yang menduduki posisi ini untuk berupaya, baik individu maupun kolektif mengamankan, atau meningkatkan posisi kekuasaan, dan menerapkan prinsip hierarkisasi yang paling relevan.

Demikian yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara Bermaksud untuk mengamankan kekuasaan dengan strategi dominasi pada beberapa urusan penting. Terutama dalam memaksimalkan institusi tertentu, baik di pemerintahan atau di organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Petahana nampak menunjukkan kelihaiannya dengan sering memberikan pengaruh. Pertama, sebagai penceramah, petahana sangat intens menerima beberapa undangan untuk berceramah di beberapa tempat, terutama saat mendekati Pemilu Bupati di Kabupaten Minahasa Tenggara 2018.

Kedua, sebagai bupati di periode 2013-2018 petahana pun sering berkunjung ke beberapa tempat dan daerah yang tersebar di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan agenda kerja bupati yang disematkan beberapa maksud dan tujuan memberikan sinyal dan stimulus agar petahana terpilih kembali sebagai Bupati. Inilah kemudian bagaimana struktur dan arena memberikan peluang bagi petahana. Modal merupakan konsentrasi kekuatan, suatu kekuatan spesifik yang beroperasi di dalam ranah. Setiap ranah menuntut untuk memiliki modal-modal khusus agar dapat hidup secara baik dan bertahan di dalamnya. Pada ranah perebutan kekuasaan tentu petahana James Sumendap memiliki modal istimewa berupa otoritas, dan prestasi sebagai seorang Bupati.

kemungkinan yang besar untuk mengamankan kekuasaannya. Sehingga dengan segala bentuk kekuasaan yang dimaksudkan menampilkan tindakan yang dihargai dan membuat personal James Sumendaps ebagai seorang yang mempunyai pengaruh besar di Kabupaten Minahasa Tenggara. Fungsi modal, bagi Bourdieu adalah relasi sosial dalam sebuah system pertukaran, yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang langka, yang layak dicari dalam bentuk sosial tertentu. Beragam jenis modal dapat dipertukarkan dengan jenis modal-modal lainnya. Penukaran yang paling dramatis adalah penukaran dalam bentuk simbolik. Sebab dalam bentuk simbolik inilah bentuk modal-modal yang berbeda dipersepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang legitimas dan penting. Demikian modal petahana yang dapat diidentifikasi berdasarkan konsepsi teori modal Bourdieu:

1. Modal Ekonomi Petahana

Pada perspektif modal ekonomi ini sebagaimana dalam teorinya disebut sebagai modal yang mudah dikonversikan dalam bentuk modal lainnya. Modal dimaksud bisa berupa finansial atau sarana produksi. Dalam Pemilu pada umumnya peserta pemilu membutuhkan sosialisasi dan kampanye untuk menyampaikan dan mengenalkan visi-misi peserta pemilu.

Pada konteks Pemilu Bupati Kabupaten MINahasa Tenggara Tahun 2018 jelas petahana juga membutuhkan beberapa modal ekonomi untuk meraih simpati konstituen. Jika diulas lebih lanjut hal yang nampak adalah dana kampanye. Kemudian pada konteks pragmatis money politic adalah hal lain yang tidak bias diungkap secara detail dalam bahasan ini. Karena dianggap di luar ranah pembahasan dan konten yang bisa dibertanggung jawabkan tanpa ada bukti yang otentik.

2. Modal Kultural Petahana

Keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, seperti kemampuan menampilkan diri di depan publik, pengetahuan dan keahlian tertentu hasil pendidikan formal, sertifikat (termasuk gelar sarjana) disebut sebagai modal cultural.

Modal kultural pada dasarnya berupa keyakinan akan nilai-nilai (values) mengenai sesuatu yang dipandang benar dan senantiasa berperan untuk mengaktualisasikannya. Pendidikan formal petahana ini berpengaruh atas keterampilan berpikir dan bertindak petahana, sehingga dalam track record kepemimpinan di berbagai organisasi dan di instansi pemerintahannya dinilai maksimal dan banyak prestasi yang dicapai.

3. Modal Sosial Petahana

Modal sosial adalah segala jenis hubungan sebagai sumber daya untuk penentuan kedudukan social. Menurut Bourdieu modal sosial ini sejatinya merupakan hubungan sosial bernilai antar orang. Hal tersebut bisa dicontohkan sebagian masyarakat yang berinteraksi antar kelas dalam lapisan sosial masyarakat. Artinya dalam hal ini interaksi sosial antar kelas adalah menentukan posisi kelasnya tersendiri.

Dicatat dalam fokus modal sosial, jelas bahwa pengelolaan modal sosial yang menjadi bagian analisis adalah bernilai produktif bagi terciptanya kepaduan social (social cohesiveness). Kepaduan sosial dimaksud adalah beberapa interaksi social antar kelas menunjukkan suatu keserasian dan kesepakatan. Untuk itulah fokus selanjutnya dari modal sosial ini adalah pada kebermaknaan modal sosial tersebut hanya dalam konteks interaksi dengan dunia luar yang sewajarnya harus terlibat proses-proses negosiasi dan adaptasi. Sehingga pada gilirannya menggiring individu-individu lain melangsungkan tindakan reinterpretatif terhadap modal sosial yang dimiliki. Untuk itulah petahana berkeyakinan menang dengan hanya mengedepankan modal social. Lebih dari hal itu, track record menjadi pertimbangan banyak orang untuk memilih petahana kembali. Selain karena sudah banyak menuai prestasi, petahana mempunyai kredibilitas yang tinggi atas kepemimpinan petahana sebagai Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara. Tentu dilihat berdasarkan capaian prestasi yang diperoleh. Terutama dalam hal pembangunan daerah dan pelayanan birokrasi yang kian membaik.

Kepemimpinan James Sumendap sebagai Bupati, dari prestasi yang dicapai banyak membuka peluang terciptanya reformasi birokrasi. Kepemimpinan petahana ini dianggap sebagai kader terbaik PDIP. Yang mempunyai tingkat kematangan berdemokrasi dan manajerial kepemimpinan yang petahana tempati sebagai bupati.

Dengan kematangan James Sumendap sudah terasa pada saat menjadi anggota dewan provinsi saat sebelum menjadi Bupati, sering sekali menemui titik kebuntuan karena ada banyak kepentingan saat rapat di DPRD berlangsung. Tapi dengan kelihaian petahana memimpin hal itu mudah teratasi dan tidak lagi ada perdebatan panjang ke depannya dengan mengedepankan cara-cara diplomatik dan demokratis, namun juga sedikit represif untuk menghindari kealotan dan kelambanan dalam membahas persoalan rakyat, apa lagi yang insident.

Tentu jika dipahami adalah track record, maka jelas segmentasi yang melihat ini adalah dari kaum muda yang berpendidikan, cendekiawan, atau tokoh profesional lainnya. Artinya semua masyarakat minahasa tenggara tidak semuanya tradisionalistik. Banyak juga yang rasional dalam melihat kepemimpinan seorang petahana.

B. Kekuatan- Kekuatan Politik Pasangan James Sumendap dan Jocke Legi.

Kekuatan – kekuatan politik pasangan James Sumendap dan Jocke Legi dalam pilkada Pada pilkada, dukungan sebagian besar masyarakat kepada calon atau kontestan tidak selalu mutlak karena faktor calon tersebut didukung oleh Partai walaupun sebahagian lainnya partai pengusung dianggap punya pengaruh sebagai mesin politik. Walaupun dalam pilkada lalu James Sumendap bukanlah seorang incumbent dalam pilkada, namun ada hal menarik dimana James Sumendap menerapkan seorang incumbent Bupati di Kabupaten Minahasa Tenggara, yang secara tidak langsung dapat mendongkrak elektabilitasnya pada saat kampanye politik, Di era pemilihan, populer dan elektabilitas memang menjadi bagian penting untuk terpilih menjadi kepala daerah. Kemenangan dalam Pilkada, secara tidak langsung dalam pilkada yang lalu kekuatan-kekuatan politik yang dibangun James Sumendap yang merupakan mantan Bupati Minahasa Tenggara dapat dimanfaatkan dalam konstalasi politik pasangan James Sumendap dan Jocke Legi untuk memenangkan Kontestasi Politik pada saat itu . Penulis membatasi jenis kekuatan politik tersebut hanya beberapa saja yang kemudian dipahami dalam skripsi ini merupakan acuan terhadap seorang kandidat mendapatkan dukungan dari salah satu daerah

pemilihannya. Partai politik sebagai partai pengusungnya, birokrasi maupun hubungan emosional yang terbangun ditengah masyarakat lokal. Inilah merupakan modal awal yang kemudian diakomodir sedemikian rupa secara berkelanjutan agar masyarakat untuk memilih sang kandidat.

Pada pilkada, dukungan sebagian besar masyarakat kepada calon atau kontestan tidak selalu mutlak karena faktor calon tersebut didukung oleh Partai walaupun sebagian lainnya partai pengusung dianggap punya pengaruh sebagai mesin politik. Walaupun dalam pilkada lalu James Sumendap adalah incumbent, namun ada hal menarik dimana James Sumendap merupakan seorang Bupati yang aktif di Kabupaten Minahasa Tenggara, yang secara tidak langsung dapat mendongkrak elektabilitasnya pada saat kampanye politik, Di era pemilihan, populer dan elektabilitas memang menjadi bagian penting untuk terpilih menjadi kepala daerah.

Politik yang dibangun oleh James sumendap yang merupakan petahana Bupati Minahasa Tenggara dapat dimanfaatkan untuk memenangkan Kontestasi Politik pada saat itu . Penulis membatasi jenis kekuatan politik tersebut hanya beberapa saja yang kemudian dipahami dalam skripsi ini merupakan acuan terhadap seorang kandidat mendapatkan dukungan dari salah satu daerah pemilihannya. Partai politik sebagai partai pengusungnya, birokrasi maupun hubungan emosional yang terbangun ditengah masyarakat lokal. Inilah merupakan modal awal yang kemudian diakomodir sedemikian rupa secara berkelanjutan agar masyarakat untuk memilih sang kandidat.

1. Birokrasi

Bagian yang lain dari kekuatan politik partai politik adalah birokrasi yang memang memiliki akar sejarah yang tidak pernah terlepas dari pengaruh politik praktis. Sejarah birokrasi mencatat bahwa kedudukan birokrasi terhadap sistem politik lokal dalam kasus ini pun juga terjadi di dalam Pilkada kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018. Penguasaan politik jaringan pemerintahan lebih terfokus pada pengkondisian birokrasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Minahasa Tenggara. Walaupun James Sumendap adalah seorang Incumbent yang dapat saja memerintahkan bawahannya untuk memilih dirinya namun jaringan yang telah dibangun selama menjabat sebagai Bupati sangatlah memengaruhi birokrasi yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memilihnya. Secara garis besar dalam pilkada, bupati mempunyai ruang gerak yang lebih luas dalam mengimplementasikan strategi kampanyenya dalam rangka proses pemenangan pilkada, karena petahana memiliki seluruh elemen atau perangkat birokrasi sehingga sangat menguntungkan, yakni menguasai akses sosial terhadap sipil. Penguasaan terhadap akses sosial ataupun loyalis ini sangat penting karena akan mendongkrak elektabilitas kandidat guna meraih kemenangan.

Seperti yang di ungkapkan salah satu tim sukses dari pasangan James Sumendap dan Joke Legi di kabupaten Minahasa Tenggara , bahwa :

“James Sumendap adalah Bupati Minahasa Tenggara jadi wajarlah kalua masyarakat Minahasa Tenggara memiilih beliau, selain itu beliau juga merupakan sosok yang smart dan berani mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat”.

Pasangan ini selalu memiliki keuntungan ganda. Pertama, dikalangan birokrat sudah jelas dengan berbagai kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh James Sumendap. Selain itu mempunyai modal sosial karena sosok yang paling dikenal masyarakat lokal karena Seorang Bupati pernah memimpin jabatan yang sangat strategis . meski ada beberapa orang belum pernah melihat rupanya. Artinya, bukan lagi masalah dan itu berarti memperkecil ruang sosialisasi personal yang lebih besar. Meskipun dilakukan, itu hanya untuk memperbesar tingkat keterpilihannya di masyarakat. Hal ini jelas berbeda dengan kandidat yang lainnya, sebab untuk membuat dirinya dikenal masyarakat, maka dirinya mau tidak mau harus melakukan sosialisasi personal yang besar dan intens. Kondisi kedua, Simbol seorang Bupati pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan daerah, dan seorang penentu kebijakan. Masyarakat akan mengenalnya sebagai seorang yang pernah berbuat untuk kepentingan masyarakat, meski soal berbuat untuk kepentingan masyarakat ini masih bisa diperdebatkan terutama seberapa besar kebijakan dan program yang diimplementasikannya tersebut terhadap perkembangan masyarakat.

Kemudian kondisi ketiga, mantan bupati biasanya memiliki sumber daya yang cukup besar, materi, sebagai akumulasi dari kepemimpinan selama ini. Selain itu juga sudah past juga

memiliki jaringan yang cukup luas di kalangan elit dan masyarakat lokal dan menjadi modal sosialnya. Karena itu, tidaklah terlalu sulit bagi untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut. Pasangan James sumendap dan Jocke Legi mungkin sudah tak asing lagi di telinga kalangan birokrat dan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara. Salah satu pasangan ini memiliki Sosok yang fleksibel terhadap birokrat atau kalangan pegawai yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Partai Politik

James Sumendap memang memiliki jabatan strategis dalam kepemimpinan Partai Politik di kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Ketua Partai PDIP sehingga didalam proses penentuan pasangan maju dalam pilkada yang lalu sangatlah mudah. namun bukan berarti kemenangan James Sumendap dalam pilkada hanya ditentukan oleh relawan tim pemengannya saja tapi lebih dari itu identifikasi partai pengusung pada proses pemilihan sangatlah kuat. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Skertaris Tim Pemenangan, mengatakan:

“semua partai pengusung pasangan James Sumendap dan Joke Legi sangat kompak, sehingga apa yang menjadi strategi pasangan ini selalu di jalankan oleh semua partai pengusung mulai dari ketua partai sampai dengan anggota partai” Pasangan pemenangan James Sumendap dan Joke Legi, semua partai pengusung dalam proses pemenangan tentu partai politik harus memiliki basis massa yang jelas dan merata, sebab tanpa basis massa tentu saja dalam membentuk kekuatan politik, partai politik akan sulit melaksanakan tugasnya untuk memenangkan kandidat yang diusungnya. Dikarenakan dukungan semua partai yang menyatakan dukungan terhadap pasangan ini begitu solid dan bekerja sesuai dengan apa yang menjadi keputusan partai.

Partai PDIP merupakan partai salah satu partai terbesar dalam mengusung pasangan ini sehingga terlihat total dalam memberikan dukungan kepada pasangan James dan Joke begitu juga dengan partai-partai pengusung yang lain begitu semangat memberikan dukungan dalam semua bentuk tuntutan dari pasangan ini. Selain kader dari Partai PDIP yang berperan aktif dalam pemilihan, partai-partai pengusung yang lain juga sangat berperan besar dalam dukungan perjuangan juga terlihat total dalam memberikan dukungan kepada pasangan James dan Joke pada pilkada di Minahasa Tenggara. Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye politik yang dilaksanakan oleh pasangan James dan Joke di 12 kecamatan yang ada di Kabupten Minahasa Tenggara, Ketua- ketua Partai menjadi juru kampanye pasangan James dan Joke.

PENUTUP

Strategi yang digunakan oleh pasangan James dan Joke adalah memanfaatkan berbagai modalitas yang dimiliki. Keunggulan kepemilikan modalitas dari pasangan ini membuat partai politik kesulitan mengusung calon lain yang bisa menandingi pasangan ini. Kepemimpinan James Sumendap yang adalah Bupati Minahasa Tenggara pada periode yang lalu, dianggap berhasil oleh masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara, selain itu beliau juga dinilai oleh masyarakat merupakan sosok yang smart dan berani mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat. Hal itu membuat masyarakat sangat ingin wilayah ini kembali di pimpin oleh beliau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo
- Arifin, Anwar. 20013. *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta PT. Balai Pustaka
- Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana
- Budiardjo, Miriam, 2008, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, PT. Gramedia , Jakarta.
- Fukuyama, Francis, (terj.Ruslani), 2002, *Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam : Yogyakarta.

- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Huntington. P.Samuel, 2003, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. (edisi terjemahan)
- Haryatmoko, *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu*. Dalam majalah BASIS Edisi Khusus Pierre Bourdieu, (Edisi November-Desember 2003)
- Hadi Amirul, dan Haryono H., 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Prihatmoko, Joko dan Moesafa. 2008. *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Salusu, J. 1996. *Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Prenada
- Siagian, P Sondang. 1985. *Strategi Politik di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sukardi. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suyanto,